

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

MENDEKATI HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIK <i>Musa Maliki, Asrudin Azwar</i>	1
KOMUNIKASI DAN GENDER : PERBANDINGAN GAYA KOMUNIKASI DALAM BUDAYA MASKULIN DAN FEMINIM <i>Sangra Juliano Prakasa</i>	19
KERJASAMA PEMBANGUNAN INDONESIA DAN UNI EROPA: SUATU ANALISIS TEORI LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL <i>Adityo Darmawan Sudagung, Arry Bainus, Abdul Musyawardi Chalid</i>	31
SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 <i>Dewi Triwahyuni, Sylvia Octa Putri</i>	43
PERAN DPRD JAWA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK <i>Dina</i>	57
MENILIK KEMBALI MAKNA REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKTUALISASI SEMANGAT PELAYANAN PUBLIK PRIMA <i>Dadi Junaedi Iskandar</i>	69
KOMUNIKASI VERBAL ANGGOTA JAMAAH TABLIGH KOTA BANDUNG <i>Inggar Prayoga</i>	91
PEMODELAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA CIMAHI <i>Titin Rohayatin, Agustina Setiawan</i>	105
PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA TENTANG PENERAPAN ATURAN PERDA K-3 DAN KEBIASAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMBUANG SAMPAH <i>Anisti</i>	121
EVALUASI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA BANJARMASIN <i>Muhammad Riduansyah Syafari</i>	131

Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional

Adityo Darmawan Sudagung¹

Arry Bainus²

Abdul Musyawardi Chalid³

Program Studi Hubungan Internasional, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Jl. Bukit Dago Utara no. 25, Bandung

Email :

soedagoeng32@gmail.com ¹

arrybainus@yahoo.com ²

musyawardichalid@yahoo.com ³

Abstract

Globalisation has increase the need of state to cooperate with others. In this case, we analyse the case of development cooperation between Indonesia and European Union. The development of their relation can give a good example on how actors cross-region cooperate each other. We were using the liberalism approach in analysing this cooperation. Both of actors cooperated because they share some interests and benefits. But, cooperation in international relations have to be more fair so there is no any disparity in international development.

Keywords: cooperation, liberalism, Indonesia, European Union

Abstrak

Fenomena globalisasi meningkatkan kebutuhan negara untuk saling bekerjasama dengan negara lainnya. Salah satu fenomena yang terjadi dalam kasus ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa di bidang pembangunan. Perkembangan hubungan kedua aktor dapat menjadi contoh suatu bentuk kerjasama yang sukses dilakukan antar aktor lintas kawasan. Analisis mengenai kerjasama dalam tulisan ini akan dibahas dengan pendekatan teori liberalisme. Keduanya saling bekerjasama dikarenakan oleh adanya kepentingan dan keuntungan. Namun, kerjasama dalam hubungan internasional harus lebih adil sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan internasional.

Kata Kunci: kerjasama, liberalisme, Indonesia, Uni Eropa

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hubungan internasional meliputi beberapa jenis pola hubungan antar negara. Pola hubungan tersebut meliputi konflik, kerjasama, perang, dan diplomasi (White, 2001; 318). Kerjasama antar negara dapat terjadi dalam rangka mencapai kepentingan masing-masing negara yang saling bertemu. Kerjasama juga dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat

diselesaikan sendiri oleh negara. Kerjasama menjadi suatu hal yang lazim bagi negara-negara di dunia sekarang ini. Kerjasama juga tidak hanya terbatas pada hubungan antar aktor negara, tetapi juga dapat melibatkan aktor non-negara. Ditambah lagi dengan fenomena globalisasi yang memperluas kesempatan aktor-aktor hubungan internasional untuk saling berinteraksi.

Fenomena tersebut terlihat dalam kerjasama antara negara dan organisasi

internasional yang akan peneliti kaji. Adapun aktor yang bekerjasama adalah Indonesia dan Uni Eropa. Kerjasama antara kedua aktor hubungan internasional tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1967 (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014).

Pada perkembangannya kerjasama yang terjadi menunjukkan peningkatan. Salah satunya adalah dengan diberikannya bantuan dana sebesar 4,3 triliun rupiah dari Uni Eropa (Heru, 2014). Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Uni Eropa di berbagai sektor. Berdasarkan data yang peneliti temukan, besarnya dana tersebut teralokasi pada sektor pendidikan sebesar 848 miliar rupiah dan sektor lingkungan sebesar 83 juta euro (Heru, 2014).

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dalam kajian ekonomi politik karena menurut peneliti hal ini berkaitan dengan isu pembangunan negara berkembang. Serta menunjukkan hubungan antara negara-negara maju dan negara berkembang. Pembangunan internasional yang dilakukan melalui kerjasama pembangunan diupayakan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di negara berkembang. Dalam kasus ini, kerjasama dilakukan oleh Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang mewakili negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang. Tulisan ini akan mengkaji masalah kerjasama Indonesia dan Uni Eropa melalui pendekatan teori liberalisme dan konsep kerjasama dalam hubungan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin menarik sebuah rumusan masalah: Bagaimana

proses kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa dari sudut pandang liberalisme hubungan internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai pendekatan teori liberalisme dan konsep kerjasama internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pembuat kebijakan di tingkat nasional, khususnya mengenai masalah kebijakan internasional di suatu negara.

2. Kajian Pustaka

2.1. Liberalisme dalam Hubungan Internasional

Liberalisme, dijelaskan oleh Mansbach dan Rafferty (2008;26), mempercayai bahwa dalam aspek politik, aktor dapat mendapatkan untung bersama atau mendapat kerugian bersama yang dikenal dengan *variable-sum game*. Kelompok liberalisme juga menekankan pemenuhan aktor atas keuntungan absolutnya (*absolute gains*), yaitu kondisi di mana semua aktor mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan internasional (Mansbach dan Rafferty, 2008; 26). Penjelasan lainnya dari varian dari liberalisme, yaitu neo-liberalisme, bahwa setiap aktor saling bergantung dengan aktor yang lainnya dalam hal mempertahankan keberlangsungannya dan juga memiliki takdir yang dibagi bersama (Mansbach dan Rafferty, 2008; 27).

Menurut Mansbach dan Rafferty (2008; 27), kondisi saling ketergantungan ini yang

menyebabkan aktor untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuannya. Dunne (2001; 176) juga memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebutkan motivasi dari negara melakukan kerjasama adalah karena “*absolute gains*” yang didapat ketimbang melihat “*relative gains*” yang didapat oleh pihak lain. Sehingga dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kerjasama dalam suatu hubungan internasional lebih dilihat sebagai pertemuan keuntungan yang akan didapat oleh kedua aktor.

Pendapat lain mengenai teori liberalisme juga dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen (2009; 139) bahwa terdapat tiga asumsi dasar. Pertama, liberalisme memandang positif terhadap sifat manusia. Kedua, liberalisme yakin bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Ketiga, liberalisme percaya pada kemajuan. Pada asumsi ketiga, kaum liberal percaya bahwa kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan di banyak bidang kehidupan (Jackson dan Sorensen, 2009; 143). Salah satu cara untuk mencapai kemajuan tersebut adalah pada asumsi kedua, yaitu kerjasama. Ketiga asumsi ini memberikan dukungan pada penjelasan mengenai teori liberalisme yang dipaparkan oleh Mansbach dan Rafferty. Sehingga teori liberalisme dirasakan peneliti dapat menjadi salah satu rujukan teoritis dalam melakukan analisa mengenai kasus kerjasama pembangunan Uni Eropa dan Indonesia.

2.2. Kerjasama dalam Hubungan Internasional

Liberalisme sudah menyebutkan salah satu konsep yang menjadi kuncinya, yaitu adanya kerjasama. Setidaknya terdapat tiga definisi konsep kerjasama dalam Hubungan Internasional yang dapat peneliti sampaikan. Pendapat pertama dikemukakan oleh

Keohane, dalam Clackson (<http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2014), yang mendefinisikan kerjasama sebagai kondisi “*when actors adjust their behaviour to the actual or anticipated preferences of others, through a process of policy coordination*”. Pendapat kedua datang dari Clackson (<http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2014) yang menjelaskan bahwa kerjasama “*basically should lead to rewards for all states, not necessarily equal rewards, but everyone should benefit*”. Sedangkan pendapat ketiga peneliti kutip dari Milner (1992; 467) yang menjelaskan kerjasama sebagai “*goal-seeking behaviour that strives to reduce the gains available to others or to impede their want-satisfaction*”.

Dari ketiga pendapat di atas dapat dilihat beberapa ciri dari kerjasama, yaitu setidaknya terdapat dua pihak, ada penyesuaian tujuan terhadap kemampuan pihak yang lain, dan ada keuntungan yang didapat oleh semua pihak. Konsep ini akan digunakan untuk memberikan gambaran fenomena kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia. Konsep kerjasama tersebut juga mendukung penjelasan teoritis dari teori liberalisme yang telah disampaikan sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa

Berdasarkan sejarahnya, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa sudah berjalan cukup lama sejak tahun 1967, saat Uni Eropa masih berupa *European Economic Community* (EEC). Keberlangsungan kerjasama antara keduanya mengalami peningkatan sejak tahun 2000, ketika Uni Eropa mengeluarkan

sebuah kebijakan berjudul “*Developing Closer Relations between Indonesia and the European Union*” (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014).

Begitupun Indonesia merespon dengan baik apresiasi Uni Eropa terhadap perkembangan di Indonesia melalui keinginan meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama lewat kerangka “*RI-EU Joint Declaration*”. Pada pertemuan di Luxemborg pada 14 Juni 2000 disepakatilah sebuah Forum Konsultasi Bilateral yang pada kemudian hari menjadi pembuka bagi kerjasama lanjutan antara keduanya, khususnya kerjasama pembangunan (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014).

Untuk kerjasama pembangunan sendiri secara khusus ditandai dengan ditandatanganinya *the EU-Indonesia Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* pada November 2009. PCA memberikan peluang bagi Uni Eropa untuk memberikan perhatian pada kerjasama di empat sektor, seperti pendidikan, hak asasi manusia dan demokrasi, perdagangan dan investasi, dan lingkungan hidup (*Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, 2013; 2*).

Kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Uni Eropa mencakup beberapa sektor, yaitu pendidikan, perdagangan dan investasi, serta penegakan hukum dan keadilan. Menurut data dari tahun 2007-2013, Indonesia merupakan negara kedua yang menerima dana bantuan terbesar setelah Afghanistan (Dikutip dari eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/index_en.htm pada tanggal 27 Mei 2014).

Melihat dari paparan sejarah kerjasama, dapat kita lihat bahwa kedua aktor memiliki

pemahaman yang baik atas aktor lainnya. Di mana dari sisi Uni Eropa melihat pada perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sementara Indonesia melihat pada itikad baik Uni Eropa dalam merangkul negara-negara dunia ketiga sebagai rekan kerjasama. Pada bagian selanjutnya akan peneliti sampaikan analisis mengenai kerjasama yang dilakukan oleh kedua aktor.

3.2 Alasan Indonesia dan Uni Eropa Bekerjasama

Pada bagian ini, peneliti akan membagi analisa mengenai kerjasama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa ke dalam dua bagian, yaitu alasan dilakukannya kerjasama dan *absolute gains* yang didapat oleh kedua aktor. Pembahasan pertama akan menjelaskan alasan dilakukannya kerjasama. Pemaparan akan diawali dengan menjelaskan kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan kepentingan Uni Eropa bekerjasama dengan Uni Eropa, dan ditambah dengan kepentingan bersama yang ada dalam kerjasama tersebut.

Terdapat empat alasan utama menurut peneliti yang menyebabkan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa berjalan dengan baik. Pertama, adalah posisi tawar Uni Eropa yang memiliki lebih dari 500 juta penduduk, yang merupakan seperempat dari PDB global dan seperlima dari jumlah perdagangan dunia (Dikutip dari <http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia> pada tanggal 23 Mei 2014). Kondisi ini menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu mitra kerjasama yang menguntungkan dan dapat diandalkan bagi Indonesia.

Kedua, itikad baik serta komitmen Uni Eropa dalam membantu pembangunan negara-negara di dunia. Uni Eropa, yang terdiri dari 28 negara, memiliki tradisi

mempromosikan pembangunan dengan total dana yang diberikan ke seluruh dunia sebesar 55 miliar euro pada tahun 2012 (dikutip dari <http://www.antaraneews.com/en/news/93903/indonesia-received-eu-grants-totaling-rp43-trillion> pada tanggal 22 Mei 2014). Uni Eropa dalam hal ini menjadikan posisi tawarnya sebagai sekumpulan negara-negara di kawasan Eropa sebagai salah satu kesempatan bagi mereka mempromosikan pembangunan yang telah berhasil mereka capai. Komitmen mereka terhadap pembangunan dunia dapat terlihat meskipun mereka sempat dilanda krisis. Sampai dengan tahun 2014 ini peneliti melihat hal itu tidak mengurangi komitmen mereka terhadap isu pembangunan di negara dunia ketiga.

Ketiga, posisi tawar Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi dan politik global yang mendorong mereka melakukan berbagai kerjasama, khususnya di Asia, dalam kerangka multilateralisme (Dikutip dari <http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia> pada tanggal 23 Mei 2014). Uni Eropa juga menunjukkan keterbukaannya dalam melakukan hubungan dengan negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Dilihat dari kaca mata liberalisme, hal ini merupakan perwujudan dari sifat naluriah manusia yang baik. Tanpa melihat apa yang akan lebih didapat oleh mitra kerjasama, selama mereka sendiri juga mendapatkan keuntungan maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Keempat, karena Uni Eropa merupakan salah satu penyumbang dana terbanyak untuk pendidikan di Indonesia (Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, 2013; 8). Alasan keempat ini juga mendukung alasan pertama di mana Uni Eropa merupakan salah satu mitra kerjasama yang dapat diandalkan oleh Indonesia. Sehingga kemudian dari alasan keempat ini, kita dapat melihat

terjadi suatu kondisi ketergantungan. Kondisi ketergantungan itu menunjukkan Indonesia sebagai negara penerima bantuan yang membutuhkan dana, sementara Uni Eropa sebagai negara donor membutuhkan negara sebagai tempat untuk menyalurkan dana bantuan.

Menurut peneliti, alasan kedua dan ketiga telah memberikan ruang bagi terciptanya kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena dari pihak Uni Eropa sendiri telah membuka diri untuk mengadakan kerjasama. Itikad yang baik dalam membuka hubungan kerjasama serta komitmen terhadap pembangunan dunia memperlihatkan sifat baik dari kelompok negara yang tergabung dalam Uni Eropa tersebut. Hal ini sejalan dengan asumsi liberal yang disebutkan oleh Jackson dan Sorensen bahwa manusia pada dasarnya adalah baik.

Secara garis besar, kepentingan Uni Eropa dalam kerjasama pembangunan dengan Indonesia adalah untuk meningkatkan peran mereka dalam dunia internasional. Seperti yang disebutkan dalam Blue Book 2013 (Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN; 1):

“The EU is therefore a key actor in international issues ranging from the promotion of peaceful progress across the world, to global climate change. The basis for the EU’s foreign policy remains ‘soft’ power: the use of diplomacy – backed where necessary by trade, aid and peacekeepers – to reduce poverty, resolve conflicts, and bring about international understanding.”

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat ada keinginan dari Uni Eropa untuk memperluas perannya di dunia internasional melalui *soft power*. Beberapa upaya tersebut dilakukan mereka melalui penggunaan diplomasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, konflik, dan pemahaman

internasional. Kepentingan ini menjadi motif utama menurut peneliti yang mendorong terciptanya kerjasama Uni Eropa dengan aktor lain di luar kawasan Eropa, yang dalam kasus ini adalah dengan Indonesia.

Keberadaan Uni Eropa sebagai aktor global memberikan satu nilai lebih dalam preferensi Indonesia memilih rekan kerjasama. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Uni Eropa, seperti dana dan teknologi mampu memberikan keuntungan yang bisa diambil oleh Indonesia dalam melakukan kerjasama tersebut. Uni Eropa yang juga terdiri dari beberapa negara maju menjadi salah satu nilai tambah, selain besarnya pasar yang dapat ditembus juga memberikan peluang bagi Indonesia menjalin hubungan yang baik secara bilateral dengan negara-negara di Eropa. Kemudahan interaksi yang terwakili lewat Uni Eropa dapat menjadi saran Indonesia mendekati diri pada pasar-pasar di negara Eropa.

Adapun kemudian Uni Eropa memilih Indonesia sebagai mitra kerjasama menurut peneliti didasari oleh beberapa alasan memiliki beberapa alasan. Pertama, adalah alasan perkembangan ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 2000, Uni Eropa menilai perkembangan yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia sangat baik. Hal ini telah peneliti singgung pada pemaparan sebelumnya di tulisan ini. Indonesia, menurut Uni Eropa telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan pada proses demokratisasi (Heru, 2014). Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia di dalam G20 dan memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 7% serta menarik bagi para investor. Ditambah dengan posisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan jalur peradangan laut dunia di perbatasan utaranya (Dikutip dari eas.europa.eu/delegations/indonesia/

eu_indonesia/cooperation/index_en.htm pada tanggal 27 Mei 2014).

Kedua, adalah karena kondisi politik dan keamanan domestik Indonesia yang stabil. Indonesia yang menjalankan demokrasi dengan baik dan stabil menjadi pilihan Uni Eropa dalam memilih rekan di kawasan Asia Tenggara. Dari segi keamanan, komitmen Indonesia terhadap penanggulangan terorisme dan separatisme juga menjadi salah satu alasan Uni Eropa menilai Indonesia cukup baik dalam menstabilkan keamanan domestiknya. Bahkan hal tersebut dinilai menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam berperan dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014).

Ketiga, adalah atas dasar posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki jumlah 40% populasi dan 35% ekonomi ASEAN. Indonesia juga merupakan negara yang diperhitungkan oleh sesama negara Asia Tenggara (Dikutip dari eas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/index_en.htm pada tanggal 27 Mei 2014). Keempat, komposisi penduduk Indonesia yang didominasi oleh penduduk muslim juga menjadi salah satu pertimbangan Uni Eropa memilih Indonesia sebagai mitra kerjasama. Indonesia juga memiliki posisi tawar yang baik di antara negara-negara muslim di dunia ditambah dengan *track record* hak asasi manusia yang meningkat secara baik (Dikutip dari eas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/index_en.htm pada tanggal 27 Mei 2014).

Kelima, adalah persepsi Uni Eropa yang menilai Indonesia sebagai negara yang bersahabat. Berikut kutipan pernyataan dari Wakil Ketua Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Colin Crooks, yang peneliti temukan:

“Indonesia is a donor and friendly country that is important to us. We want the relationship between the two parties to address the global problems of the 21st century. The changing form of the relationship should also be represented in the way we work together in achieving the development goals,” (Heru, 2014).

Jika kita merujuk pada pernyataan tersebut, terlihat bahwa Uni Eropa memberikan *image* baik pada Indonesia. Pemberian identitas tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang baik di mata Uni Eropa. Beberapa alasan yang telah peneliti sampaikan dirasa mampu menjelaskan preferensi Uni Eropa memilih Indonesia sebagai mitra kerjasama, khususnya di bidang pembangunan. Alasan-alasan tersebut menjadi sangat penting dalam melihat kerjasama karena didasari oleh tujuan tertentu yang disesuaikan dengan mitra kerjasamanya. Hal tersebut dijelaskan oleh penjelasan konseptual mengenai kerjasama yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

Dari kelima alasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat peneliti jelaskan bahwa pada beberapa alasan Uni Eropa memilih Indonesia dikarenakan oleh kondisi domestik di Indonesia yang baik. Baik dalam arti Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang stabil dan ditunjang dengan keadaan politik keamanan yang baik. Penerapan demokrasi yang baik di Indonesia juga menjadikan alasan bagi Uni Eropa memilih Indonesia sebagai mitra kerjasama dalam program pembangunan. Kerjasama ini juga dapat dilihat dari segi kebutuhan dan penawaran.

Dari sisi Indonesia, kebutuhan akan dana untuk mempercepat pembangunan sangatlah besar. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi baik, menurut peneliti Indonesia juga masih memerlukan dana yang besar untuk mensukseskan program pembangunan. Dalam hal ini, Uni Eropa yang bisa dikatakan telah mapan

dan diperhitungkan dalam percaturan dunia global, memiliki komitmen dalam mengumpulkan dana maupun bantuan bagi negara-negara di dunia. Pertemuan antara kebutuhan dan penawaran ini yang juga menurut peneliti menjadi titik temu antara keduanya.

Keterbukaan yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam menyikapi globalisasi memberikan mereka peluang bagi datangnya pihak luar yang menawarkan kerjasama. Karena setiap aktor dalam hubungan internasional susah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak mungkin *survival* sendiri, maka pendapat kaum liberalis yang melihat kerjasama sebagai salah satu jalan keluar bagi negara maupun aktor hubungan internasional lainnya. Prinsip manusia pada dasarnya adalah baik juga terlihat dari keterbukaan yang ditunjukkan oleh Indonesia yang membuka diri dalam melakukan kerjasama.

Adapun selain kepentingan masing-masing aktor terhadap aktor lainnya terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya. Ditinjau dari kesamaan kepentingan, kedua aktor memiliki kesamaan agenda, di antaranya adalah pada isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, *good governance*, dan anti terorisme (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014). Kesamaan tujuan dalam peningkatan kualitas demokrasi merupakan salah satu dari alasan Uni Eropa memilih Indonesia bekerjasama, begitupun Indonesia yang merasa memiliki kesamaan paham menentukan terjadinya kerjasama.

Begitu juga dengan isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama. Masalah lingkungan juga menjadi perhatian kedua aktor bersama. Upaya pelestarian lingkungan sebagai respon mengatasi perubahan iklim global menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki

hutan dunia dan Uni Eropa sebagai kumpulan negara maju pada titik temu. Agenda penerapan *good governance* pada kedua aktor juga mendorong terjadinya kerjasama. Mereka juga memiliki kesamaan pada perhatian atas paham anti terorisme. Beberapa kesamaan agenda ini menjadikan mereka menempatkan diri sebagai mitra bagi aktor yang lainnya. Adanya kesamaan-kesamaan dalam hal tujuan tersebut menjadikan para aktor ini memiliki dasar dalam melakukan kerjasama.

Bahkan disebutkan pada data yang peneliti temukan, kedua aktor di tahun 2007 menegaskan hubungan keduanya memainkan peranan penting dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan regional maupun global (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014). Kesamaan pemikiran dan paham dalam memainkan peran yang penting di kawasan maupun global juga merupakan salah satu kesamaan kepentingan yang melandasi kerjasama dilakukan. Kepentingan yang sama di beberapa isu tersebut juga menjadi salah satu alasan dilakukannya kerjasama antara kedua aktor tersebut. Hal ini sependapat dengan konsep kerjasama yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa terdapat penyesuaian tujuan melalui suatu kerjasama.

3.3 *Absolute Gains* dalam Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa

Keuntungan secara praktis dari adanya kerjasama ini dapat dilihat dari dua sisi, dari pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa. Jika dilihat dari pihak Indonesia, adanya kerjasama pembangunan ini memberikan mereka bantuan dana dalam menyelenggarakan program pembangunan di beberapa sektor yang disepakati, yaitu sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan

penegakan hukum serta juga meliputi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pada periode tahun 2007-2013 saja Uni Eropa memberikan tambahan dana sebesar 494 juta euro sebagai bantuan pembangunan ke Indonesia (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014). Sementara di tahun 2013, berdasarkan laporan "*Blue Book 2014*" besaran bantuan dana yang diberikan adalah 4,3 triliun rupiah (Heru, 2014). Dana bantuan tersebut menurut peneliti memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya posisi tawar Indonesia di mata dunia, khususnya Uni Eropa, akibat dari peningkatan kualitas pembangunan serta terpeliharanya kerjasama ini dengan baik dari tahun ke tahun.

Bantuan yang diberikan dalam kerangka kerjasama ini jelas memberikan keuntungan bagi Indonesia. Untuk mengejar beberapa program pembangunan yang telah dicanangkan oleh dunia internasional, seperti MDGs, memang membutuhkan dana yang cukup besar. Apalagi standar yang dibuat memang cenderung mengikuti standar negara-negara maju di Eropa. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut, Indonesia mampu memiliki modal untuk melanjutkan program pembangunannya.

Keuntungan lain yang didapat oleh Indonesia dengan membuka kerjasama dengan Uni Eropa adalah masuknya investasi dari Eropa ke Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencapai angka 20,14 miliar euro dan terus meningkat sejak tahun 2008. Selain itu, dengan terjalinnya hubungan baik antara keduanya, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari ekspor barang-barang ke Eropa sebesar 15,45 miliar dolar amerika (Dikutip dari <http://embassyofindonesia>).

eu/content/indonesia-eu pada tanggal 27 Mei 2014).

Hubungan perdagangan yang meningkat merupakan keuntungan lanjutan dari adanya kerjasama tersebut. Melalui kerjasama di bidang pembangunan, kesemua aktor yang terlibat telah memiliki pengalaman dalam menjalin hubungan yang baik. Kekhawatiran akan adanya kecurangan dalam kerjasama sudah dihilangkan karena untuk menghasilkan kerjasama yang baik tentunya harus memiliki dasar kepercayaan antar sesama pihak yang baik juga. Liberalisme mendukung adanya kepercayaan atas pihak lain sebagai pondasi dalam suatu hubungan internasional. Adanya kecurigaan justru dapat menyebabkan gagalnya kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak.

Adanya kerjasama ini menurut peneliti juga memberikan dampak yang baik pada hubungan antara Indonesia dan negara-negara di Eropa. Pernyataan dari Uni Eropa tentang pentingnya Indonesia menjadi contoh adanya kepercayaan mereka terhadap Indonesia. Baik kepercayaan dalam hal menjalankan dana bantuan yang meliputi berbagai program pembangunan. Hubungan yang baik ini menurut peneliti dapat dijadikan salah satu nilai tambah Indonesia dalam melakukan negosiasi-negosiasi dengan negara Eropa maupun negara lain di luar Eropa. Karena Indonesia sudah mendapatkan reputasi yang baik di mata negara-negara Uni Eropa melalui praktek kerjasama pembangunan tersebut.

Dari sudut pandang Uni Eropa, jika kita merujuk pada alasan dan kepentingan mereka bekerjasama dengan Indonesia dapat dilihat beberapa keuntungan yang didapatkan melalui kerjasama tersebut. Secara teknis, dari kerjasama yang dilakukan melalui terbukanya hubungan antara keduanya, Uni Eropa mendapatkan

keuntungan 7,5 miliar euro lewat kegiatan ekspor barangnya ke Indonesia (Dikutip dari <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu> pada tanggal 27 Mei 2014). Uni Eropa juga kemudian memiliki rekanan dalam menjual barang-barang produksinya ke Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk yang besar, Indonesia juga merupakan pasar yang potensial bagi pasar. Kebiasaan masyarakat di Indonesia yang lebih antusias memberi barang impor dapat menjadi salah satu peluang bagi Uni Eropa dalam memasarkan barang-barang hasil produksinya. Karena tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia atas barang produksi luar negeri masih cukup tinggi.

Keuntungan lainnya yang didapat oleh Uni Eropa adalah penyebaran nilai demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Melalui kerjasama dengan Indonesia yang merupakan negara strategis di kawasan, menempatkan penyebaran isu tersebut akan juga diperhatikan dalam organisasi kawasan Asia Tenggara atau secara khusus di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dari paparan sebelumnya mengenai peran Indonesia di Asia Tenggara, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi perpanjangan tangan Eropa dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Adanya kesamaan visi dalam hal memperjuangkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia, peneliti lihat dapat menjadi suatu keuntungan. Uni Eropa dapat memperluas penyebaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ke beberapa kawasan lain melalui kerjasama.

Pengaruh yang diberikan sebagai negara pemberi bantuan menurut peneliti dapat memberikan kekuatan tersendiri dalam merubah atau menyarankan penerapan demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penggunaan *soft power* melalui pemberian bantuan dana adalah cara Uni Eropa

dalam memperluas pengaruhnya di dunia. Sehingga Uni Eropa melalui kerjasama ini memperoleh wadah untuk menularkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka junjung tinggi.

Pembangunan yang baik di bidang pendidikan juga menjadi jembatan dalam mencapai pembangunan negara yang baik. Melalui kerjasama ini, Uni Eropa menempatkan upaya mereka mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai cara meningkatkan pembangunan di skala regional maupun global. Dengan adanya kerjasama tersebut, Uni Eropa juga mendapatkan prestise dan penilaian yang baik sebagai salah satu aktor global yang berperan penting dalam pembangunan dunia. Bersamaan dengan itu Uni Eropa juga membuka kemungkinan masuk ke dalam pasar Asia yang potensial dalam beberapa tahun terakhir ini.

Merujuk dari konsekuensi teoritis dari kerjasama dalam persepektif liberalisme, terlihat bahwa kedua aktor menempatkan kerjasama sebagai alat pemenuhan *absolute gains*. Keduanya tidak melihat apa yang akan didapat oleh aktor yang lain dari kerjasama ini. Tetapi, lebih melihat dari keuntungan apa yang bisa didapat dari mengadakan kerjasama dengan aktor lain. Penjelasan ini sesuai dengan fakta dalam kasus yang sedang dibahas, yaitu kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang pembangunan. Keuntungan yang didapat sebagai kelanjutan dari alasan-alasan mereka bekerjasama menjadi faktor utama diadakannya kerjasama antara keduanya.

Namun, perlu diperhatikan apakah kerjasama ini akan berpola negara dunia ketiga sebagai penerima bantuan saja. Perlu dikritisi pola-pola semacam ini karena meskipun tidak tampak secara jelas, pola kerjasamanya bersifat asimetris. Melalui pola yang asimetris ini di mana

Uni Eropa memiliki nilai tawar yang lebih baik, menyebabkan bisa terjadi suatu saling ketergantungan asimetris yang pada ujungnya bisa menyebabkan hubungan ketergantungan. Pola ini yang perlu dihindari oleh pembuat kebijakan negara dalam menjalankan suatu kerjasama dengan aktor yang memiliki nilai tawar yang lebih tinggi.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai kesimpulan dari pembahasan kasustersebut,peneliti dapat menyampaikan bahwa dalam suatu kerjasama yang dipandang dalam perspektif liberalisme, keuntungan bersama atau keuntungan masing-masing pihak menjadi pemicu diadakannya suatu hubungan kerjasama. Kerjasama juga dilakukan untuk menjawab masalah atau kepentingan bersama yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat. Suatu kerjasama juga dapat dipandang sebagai pengimplementasian prinsip dasar manusia pada dasarnya adalah baik.

Rekomendasi peneliti adalah untuk melaksanakan kerjasama yang baik dalam hubungan internasional, perlu diawali oleh keterbukaan aktor terhadap aktor yang lain dan juga adanya kepentingan yang sama, serta adanya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing aktor. Meskipun demikian, suatu kerjasama yang baik juga harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak lain untuk berperan dan tidak hanya bersifat berat sebelah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Baylis, John dan Smith, Steve. (Editor). 2001. *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations (2nd edition)*. Oxford: Oxford University Press.

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN. 2013. *Blue Book 2013: EU-Indonesia Development Cooperation 2012*. Jakarta: Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN.

Dunne, Tim. 2001. "Liberalism". Dalam John Baylis dan Steve Smith (penyunting). *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations* (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Jackson, Robert dan Sorensen, George. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mansbach, Richard W. dan Rafferty, Kirsten L. 2008. *Introduction to Global Politics*. New York: Routledge.

White, Brian. 2001. "Diplomacy" Dalam John Baylis dan Steve Smith (penyunting). *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations* (2nd edition). John Baylis dan Steve Smith (editor). Oxford: Oxford University Press.

Artikel dalam Jurnal

Milner, Helen. 1992. "International Theories of Cooperation: Strengths and Weaknesses", dalam *World Politics*.

Artikel dalam Websites

Clackson, Alexander. 2011. *Conflict and Cooperation in International Relations*. <http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/>.

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN. *Brosur Kerjasama Pembangunan Uni Eropa-Indonesia*. <http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia>.

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN. Cooperation. http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/index_en.htm.

Heru. 2014. Indonesia received EU grants totaling Rp4.3 trillion. <http://www.antaraneews.com/en/news/93903/indonesia-received-eu-grants-totaling-rp43-trillion>.

Indonesia Embassy Brussels. Indonesia & EU. <http://embassyofindonesia.eu/content/indonesia-eu>.

